

PERAN TNI AD SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PERTAHANAN : STUDI KASUS MISI PERDAMAIAN PBB DI AFRIKA (MONUSCO) TAHUN 2021-2022

Arief Ridwan Adhiguna¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Indonesian National Army (TNI AD) as an instrument of defense diplomacy through a case study of the United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO) during 2021–2022. Employing a qualitative case study approach and literature review, the research integrates Realism, Defense Diplomacy, and Constructivism theories to explain the strategic, operational, and normative dimensions of TNI AD's involvement. The findings indicate that TNI AD's role in MONUSCO extends beyond security functions to include infrastructure development, humanitarian assistance, and strengthening relations with local communities. Such involvement contributes to Indonesia's positive image, enhances soft power, and strengthens its position in global diplomacy. However, a gap is identified between field practices (*das sein*) and normative ideals (*das sollen*), particularly in inter-agency synergy and the use of mission outcomes as long-term diplomatic tools. The study recommends enhancing military diplomacy capacity, integrating defense and foreign policy strategies, and conducting systematic evaluations to maximize TNI AD's role in global diplomacy.

Keywords: Indonesian Army, defense diplomacy, MONUSCO, UN peacekeeping mission

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai instrumen diplomasi pertahanan melalui studi kasus Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) pada tahun 2021–2022. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan studi literatur, kajian ini memadukan teori Realisme, Diplomasi Pertahanan, dan Konstruktivisme untuk menjelaskan dimensi strategis, operasional, dan normatif dari keterlibatan TNI AD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TNI AD di MONUSCO tidak hanya mencakup fungsi keamanan, tetapi juga pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, dan penguatan hubungan dengan masyarakat lokal. Keterlibatan ini berkontribusi pada citra positif Indonesia, peningkatan soft power, dan penguatan posisi diplomasi global. Namun, ditemukan gap antara praktik lapangan (*das sein*) dan ideal normatif (*das sollen*), khususnya dalam sinergi antar-lembaga dan pemanfaatan hasil misi sebagai instrumen diplomasi jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas diplomasi militer, integrasi strategi pertahanan-luar negeri, dan evaluasi sistematis untuk memaksimalkan peran TNI AD dalam diplomasi global.

Kata kunci: TNI AD, diplomasi pertahanan, MONUSCO, misi perdamaian PBB

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan pentingnya perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, TNI Angkatan Darat (TNI AD) tidak hanya menjadi alat pertahanan negara secara militer, tetapi juga bertindak

sebagai aktor penting dalam diplomasi pertahanan yang bersifat aktif, konstruktif, dan strategis. Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia turut serta menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Peran ini memberikan citra positif terhadap diplomasi Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam percaturan geopolitik internasional. Melalui misi perdamaian, TNI AD memainkan peran penting dalam menjembatani aspek pertahanan dan hubungan internasional melalui pendekatan militer yang berorientasi pada perdamaian.

Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia bukanlah semata-mata hasil dari kewajiban normatif sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga dilandasi oleh kesadaran historis dan moral sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Pengalaman kolonialisme membentuk pandangan strategis Indonesia bahwa stabilitas global merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, dan bahwa perdamaian adalah prasyarat penting bagi pembangunan dan kemanusiaan. Indonesia melihat partisipasinya dalam pasukan perdamaian sebagai kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan global dan solidaritas antarbangsa. Selain itu, melalui misi perdamaian, Indonesia memperkuat soft power-nya di mata dunia, sekaligus memperluas jejaring kerja sama pertahanan multilateral. Dengan demikian, diplomasi pertahanan melalui keterlibatan TNI AD diakui sebagai sarana untuk memperluas pengaruh internasional Indonesia secara damai.

Secara teoritis, peran TNI AD dalam diplomasi pertahanan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) yang memandang militer sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, membangun kepercayaan antarnegara, dan mencegah konflik. Menurut Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan mencakup berbagai aktivitas non-tempur seperti pelatihan bersama, kerja sama teknis militer, dan keterlibatan dalam operasi pemeliharaan perdamaian (Yusfiana, 2014). Dalam konteks ini, TNI AD menjadi representasi kebijakan luar negeri Indonesia yang menjembatani kepentingan nasional dengan norma internasional melalui operasi militer yang bersifat kooperatif. Diplomasi pertahanan juga dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi, saling pengertian, dan pembentukan norma keamanan kolektif. Maka dari itu, keterlibatan TNI AD dalam misi PBB tidak hanya mencerminkan profesionalisme militer, tetapi juga strategi diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem internasional.

Keikutsertaan Indonesia dan TNI AD dalam misi perdamaian dunia telah berlangsung sejak era 1950-an dan semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir. TNI AD telah mengirimkan berbagai kontingen militer ke berbagai wilayah konflik, seperti Lebanon, Sudan, Haiti, dan Kongo, sebagai bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (*UN Peacekeepers*) (PUSPEN TNI, 2015). Partisipasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memegang peran aktif dalam menjaga ketertiban internasional dan memperkuat solidaritas global. Selain itu, keterlibatan tersebut menjadi sarana pelatihan dan peningkatan kapasitas personel TNI AD dalam konteks multinasional dan multikultural. Indonesia secara konsisten berada dalam jajaran lima besar negara pengirim pasukan terbanyak ke misi PBB, yang menunjukkan komitmen jangka panjang dan keseriusan dalam kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Dasar hukum dan normatif dari keterlibatan Indonesia dan TNI AD dalam menjaga perdamaian dunia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan nasional maupun resolusi internasional. Secara konstitusional, komitmen terhadap perdamaian dunia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Di tingkat operasional, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa TNI dapat melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk dalam konteks operasi perdamaian. Dalam konteks global, keterlibatan Indonesia dilandasi oleh mandat PBB, terutama melalui resolusi Dewan Keamanan yang memberikan otorisasi terhadap misi-misi seperti MONUSCO di Kongo. Selain itu, kebijakan luar negeri

Indonesia yang bebas aktif menjadi dasar normatif dalam membangun peran TNI AD sebagai instrumen diplomasi non-konfrontatif. Konvergensi antara aspek konstitusional, hukum nasional, dan norma internasional inilah yang menjadi landasan legitimasi keikutsertaan TNI AD dalam misi perdamaian global.

Misi MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) merupakan salah satu misi perdamaian terbesar dan terkompleks yang dijalankan oleh PBB, dan Indonesia, melalui TNI AD, menjadi bagian penting dalam operasi ini. Pada periode 2021-2022, TNI AD mengirimkan kontingen militer untuk membantu proses stabilisasi dan rekonstruksi pasca-konflik di Republik Demokratik Kongo. Dalam pelaksanaan tugasnya, pasukan TNI AD tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga membangun infrastruktur, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa TNI AD mampu beradaptasi dalam lingkungan yang multinasional dan kompleks, sekaligus memperkuat legitimasi Indonesia di forum internasional. Keberhasilan ini juga menjadi cerminan profesionalisme TNI AD dalam menjawab tantangan misi global.

Berdasarkan uraian tersebut, jika di analisa berdasarkan aspek *das sein* (kenyataan empiris) dan *das sollen* (ideal normatif) mengenai peran TNI AD sebagai instrumen diplomasi pertahanan. *Das sein*-nya menunjukkan bahwa TNI AD telah aktif berkontribusi dalam misi perdamaian, seperti di MONUSCO, dan mendapatkan apresiasi internasional atas profesionalismenya. Namun, *das sollen*-nya menunjukkan bahwa peran tersebut idealnya harus disertai dengan peningkatan kapasitas diplomasi militer, sinergi dengan kementerian luar negeri, serta integrasi agenda strategis nasional dalam setiap misi. Masih terdapat kekurangan dalam aspek evaluasi strategis, diplomasi simbolik, dan pelaporan hasil misi yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi jangka panjang. Oleh karena itu, terdapat gap antara realitas empiris dan ekspektasi normatif yang dapat menjadi ruang bagi penelitian akademik lebih lanjut. Gap ini mencerminkan pentingnya merumuskan model diplomasi pertahanan yang lebih terpadu dan sistematis ke depan.

Dalam perspektif hubungan internasional, studi ini membuka ruang untuk mengkaji efektivitas diplomasi pertahanan sebagai bagian dari strategi soft power Indonesia di panggung global. Selama ini, studi mengenai diplomasi Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek politik dan ekonomi, sementara dimensi pertahanan masih kurang tereksplorasi secara akademik. Melalui studi kasus MONUSCO, peneliti dapat melihat bagaimana instrumen militer digunakan secara damai untuk membangun reputasi, kepercayaan, dan kerja sama internasional. Kajian ini juga bisa memperluas cakupan teori keamanan non-tradisional, dengan menempatkan misi perdamaian sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Oleh karena itu, riset ini relevan untuk mengisi kekosongan dalam literatur diplomasi pertahanan Indonesia di konteks operasional global.

Lebih jauh lagi, kajian ini dapat memperkaya pemahaman tentang sinergi antar-lembaga dalam mendukung misi perdamaian, seperti antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI. Hal ini penting mengingat diplomasi pertahanan tidak hanya menyangkut pengiriman pasukan, tetapi juga komunikasi strategis, pelaporan hasil, dan diplomasi publik. Aspek logistik, politik, dan sosial dari misi seperti MONUSCO menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan nasional terhadap agenda diplomasi global. Penelitian ini juga dapat menilai bagaimana proses pembelajaran institusional dari misi sebelumnya digunakan untuk memperbaiki peran Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, peran TNI AD dalam diplomasi pertahanan menjadi gambaran konkret dari diplomasi multidimensi Indonesia.

Sebagai studi kasus, misi MONUSCO juga memperlihatkan bagaimana TNI AD mengelola tantangan kompleks seperti konflik bersenjata lokal, ketegangan etnis, serta ancaman milisi bersenjata yang tidak terkonsolidasi. Dalam konteks ini, pendekatan humanistik dan profesional dari TNI AD menjadi kunci keberhasilan misi di lapangan. Selain itu, peran TNI AD dalam membangun infrastruktur sipil seperti jembatan, jalan, dan fasilitas umum memperkuat aspek pembangunan dalam diplomasi pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia bukan sekadar militeristik, tetapi juga berorientasi pada pembangunan dan kemanusiaan. Kontribusi ini memperkuat nilai universal dalam diplomasi Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan solidaritas global.

Keterlibatan TNI AD dalam MONUSCO juga memiliki dampak terhadap internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan kerja sama internasional di lingkungan militer Indonesia. Prajurit yang terlibat dalam misi perdamaian belajar tentang pentingnya diplomasi, komunikasi lintas budaya, dan empati terhadap masyarakat sipil. Nilai-nilai ini kemudian diinternalisasi dan menjadi bagian dari pembentukan karakter prajurit TNI yang profesional, humanis, dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan demikian, misi ini juga menjadi wahana pendidikan strategis dan transformasi budaya organisasi militer. Hal ini memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.

Dalam konteks keilmuan, kajian ini memiliki signifikansi tinggi untuk pengembangan studi strategis, hubungan internasional, dan diplomasi militer. Penggunaan studi kasus MONUSCO sebagai titik fokus analisis memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara kebijakan luar negeri, strategi pertahanan, dan operasi militer non-perang. Hal ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia mengimplementasikan agenda global melalui institusi militernya. Kajian ini juga dapat menjadi basis formulasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas misi perdamaian di masa mendatang. Dengan pendekatan interdisipliner, studi ini mampu menjembatani ranah militer dan diplomasi sebagai entitas yang saling melengkapi dalam strategi kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi dasar dari penelitian berjudul : Peran TNI AD sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan: Studi Kasus Misi Perdamaian PBB di Afrika (MONUSCO) Tahun 2021–2022.

Kajian ini merupakan kontribusi penting dalam memahami transformasi peran militer dari aktor tempur menjadi aktor diplomatik. Kajian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan bukan hanya domain negara-negara besar, tetapi juga dapat diaktualisasikan oleh negara berkembang dengan pendekatan humanis dan multilateral. Peran aktif TNI AD dalam MONUSCO mencerminkan profesionalisme, kapasitas adaptif, serta komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Lebih dari itu, kajian ini menyoroti gap antara kenyataan dan harapan yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan penelitian strategis. Dengan memahami secara mendalam peran TNI AD dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam arsitektur perdamaian internasional.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik ini menggunakan tiga teori utama yang saling melengkapi untuk memahami peran TNI AD dalam misi perdamaian MONUSCO sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Teori Realisme Hans J. Morgenthau (1948) memberikan dasar pemahaman bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi MONUSCO bukan hanya tindakan altruistik, tetapi juga bagian dari strategi untuk meningkatkan posisi tawar dan pengaruh

nasional di arena internasional (Morgenthau, 1948). Dalam perspektif realisme, negara sebagai aktor utama bertindak rasional berdasarkan kepentingan nasional yang didefinisikan dalam bentuk kekuasaan, sehingga pengiriman pasukan TNI AD dapat dipahami sebagai proyeksi kekuatan lunak berbasis militer untuk memperkuat reputasi global Indonesia, memperluas kerja sama strategis, dan meningkatkan legitimasi negara melalui mekanisme keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional yang kompetitif.

Teori Diplomasi Pertahanan yang dikembangkan oleh Cottey dan Forster (2004) serta diperluas oleh Kearns dan Bendix (2013) menempatkan militer sebagai instrumen aktif dalam membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat kerja sama internasional melalui penggunaan sumber daya militer secara damai untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan keamanan nasional. Teori ini menggeser pemahaman tradisional militer sebagai alat kekuatan keras menjadi entitas strategis dalam diplomasi lintas batas, di mana aktivitas seperti pengiriman pasukan perdamaian, kunjungan militer, dan pelatihan gabungan menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh diplomatik tanpa menggunakan kekuatan secara koersif. Melalui empat indikator utama yaitu transparansi dan pembangunan kepercayaan, keterlibatan multilateral, transfer kapabilitas dan pengetahuan, serta pencegahan konflik, kehadiran TNI AD dalam MONUSCO berkontribusi pada pembangunan kepercayaan global dan penguatan kapasitas melalui kerja sama teknis lintas negara.

Teori Konstruktivisme Alexander Wendt (1999) melengkapi analisis dengan menekankan bahwa struktur dan dinamika hubungan internasional dibentuk oleh konstruksi sosial berupa ide, norma, identitas, dan interaksi antar aktor, bukan semata-mata oleh kekuatan material. Dalam konteks ini, keikutsertaan TNI AD dalam misi MONUSCO didorong oleh konstruksi identitas Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dunia, diperkuat oleh norma internasional tentang tanggung jawab global dalam menjaga stabilitas, serta interaksi sosial yang terjalin antara TNI AD dan komunitas internasional dalam operasi PBB. Melalui indikator identitas negara, norma internasional, interaksi sosial, dan konstitusi struktur sosial, Indonesia secara aktif terlibat dalam proses pembentukan norma global tentang perdamaian dan diplomasi militer, yang memungkinkan transformasi struktur sosial internasional yang lebih damai sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai ideologis dan normatif Indonesia dalam arena global. Ketiga teori ini secara sinergis memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana TNI AD berfungsi sebagai instrumen diplomasi pertahanan yang tidak hanya melayani kepentingan strategis nasional, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan tatanan global yang lebih stabil dan kooperatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2013), yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran TNI AD sebagai instrumen diplomasi pertahanan dalam misi perdamaian PBB di Afrika (MONUSCO) pada tahun 2021–2022. Metode kualitatif dipilih karena fenomena ini melibatkan dinamika multidimensional seperti konstruksi identitas militer, interaksi antaraktor internasional, dan strategi soft power Indonesia yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan interpretatif dan kontekstual. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami interaksi antara aktor, kebijakan, dan nilai-nilai normatif dalam implementasi diplomasi pertahanan, serta

menginterpretasikan makna di balik tindakan militer non-perang yang dilakukan TNI AD di panggung internasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur mendalam untuk menelaah dokumen kebijakan, teori-teori relevan, jurnal ilmiah, laporan resmi PBB, dokumen TNI, serta kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Proses ini dimulai dengan identifikasi topik dan fokus kajian, penelusuran sumber literatur kredibel, kategorisasi dan analisis isi berdasarkan relevansi dan validitas, kemudian sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola dan menyusun narasi analitis yang mendukung argumen penelitian. Pendekatan studi literatur dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, serta relevan dalam konteks keterbatasan akses data primer lapangan untuk studi kebijakan dan hubungan internasional.

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif fenomenologi menurut Miles dan Huberman (1992) dengan tiga tahapan yang dilakukan secara siklus: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data meliputi proses seleksi, fokus, dan penyederhanaan data dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema dan pola penting. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur untuk memahami fenomena dan merencanakan analisis selanjutnya. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang dilakukan secara berulang untuk memastikan kebenaran temuan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber menurut Sugiyono (2015) untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber literatur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah upaya internasional yang dijalankan untuk membantu negara yang mengalami konflik menciptakan serta mempertahankan perdamaian pasca-konflik. Mandat misi ini berasal dari Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan mencegah kekerasan berulang, mendukung proses politik, melindungi warga sipil, dan membantu pembangunan institusi negara. Operasi ini menggabungkan personel militer, polisi, dan sipil dari berbagai negara anggota, berpegang pada prinsip netralitas, non-kekerasan (kecuali untuk perlindungan diri atau warga sipil), serta penghormatan kedaulatan negara tuan rumah.

Sejarahnya dimulai tahun 1948 melalui UNTSO yang memantau gencatan senjata pasca Perang Arab-Israel pertama (Adhim & Yuliati, 2020). Pada 1950-1960-an, misi berkembang seperti UNEF 1956 di Krisis Suez, yang merupakan misi bersenjata pertama PBB untuk menciptakan zona aman. Era Perang Dingin membatasi efektivitas misi karena rivalitas blok, namun PBB tetap menjalankan operasi di Kongo (ONUC, 1960) dan Siprus (UNFICYP, 1964). Pasca-Perang Dingin, misi perdamaian berkembang menjadi multidimensi, mencakup militer, sipil, polisi, dan pembangunan negara, seperti di UNTAC (Kamboja) dan UNTAG (Namibia). Meski demikian, kegagalan tragis seperti di Rwanda (UNAMIR) dan Srebrenica menunjukkan keterbatasan sumber daya dan mandat. Abad ke-21 menghadirkan tantangan kompleks seperti kelompok bersenjata non-negara, terorisme, dan instabilitas politik, yang direspons dengan

teknologi baru, reformasi pelatihan, serta fokus pada perlindungan sipil dan pembangunan. Fungsi dan Peran Misi Perdamaian PBB meliputi:

- Menjaga perdamaian pasca-konflik dengan memantau gencatan senjata, memastikan penarikan pasukan bertikai, dan menciptakan zona aman untuk dialog politik.
- Perlindungan warga sipil, terutama kelompok rentan, dengan mandat intervensi terbatas bila diperlukan.
- Fasilitasi transisi politik, termasuk penyelenggaraan pemilu dan dialog rekonsiliasi nasional.
- Reformasi sektor keamanan dan hukum melalui pelatihan aparat dan pembenahan institusi.
- Tanggapan krisis kemanusiaan bersama badan-badan PBB seperti UNHCR, WFP, WHO, dan UNICEF.
- Program DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration) untuk perlucutan senjata dan reintegrasi mantan kombatan.
- Pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pemerintahan lokal, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Misi MONUSCO

MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) adalah misi PBB yang bertugas membantu proses stabilisasi dan rekonstruksi pasca-konflik di Republik Demokratik Kongo (RDK)(MONUSCO, n.d.). Misi ini merupakan kelanjutan dari MONUC (1999) yang dibentuk untuk meredam konflik bersenjata di Kongo pasca runtuhnya rezim Mobutu dan pecahnya Perang Kongo. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1925 (2010) mengubah mandat MONUC menjadi MONUSCO, dengan fokus pada stabilisasi, perlindungan warga sipil, dan dukungan pada pemerintah Kongo.

RDK adalah negara luas di Afrika Tengah dengan sejarah panjang konflik etnis, politik, dan perebutan sumber daya alam. Wilayah timur RDK, seperti Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri, menjadi pusat ketegangan akibat aktivitas kelompok bersenjata, perebutan tambang, dan ketidakstabilan pemerintahan. MONUSCO menjadi salah satu misi terbesar PBB, melibatkan puluhan ribu personel dari berbagai negara, dilengkapi komponen militer, polisi, dan sipil. Mandat MONUSCO mencakup:

- Perlindungan warga sipil dari ancaman langsung.
- Mendukung reformasi sektor keamanan Kongo.
- Memfasilitasi proses politik dan rekonsiliasi nasional.
- Mendukung operasi kontra-kelompok bersenjata bersama Angkatan Bersenjata Kongo (FARDC).
- Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar pasca-konflik.

Urgensi MONUSCO didasari situasi keamanan RDK yang masih rapuh meski ada perjanjian damai. Kelompok bersenjata seperti FDLR, ADF, dan milisi lokal mengancam warga sipil dan stabilitas politik. Kekerasan seksual sebagai senjata perang, pelanggaran HAM, dan pengungsian massal menambah beban kemanusiaan. Dalam konteks ini, kehadiran

MONUSCO menjadi vital untuk mencegah eskalasi konflik, mendukung reformasi keamanan, dan memfasilitasi transisi menuju stabilitas.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam MONUSCO bukan hanya bentuk kepatuhan pada mandat PBB, tetapi juga implementasi politik luar negeri bebas aktif. TNI AD sebagai bagian dari Kontingen Garuda berkontribusi melalui pengamanan wilayah, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Keterlibatan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara kontributor perdamaian dan meningkatkan soft power di forum internasional.

Peran TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) periode 2021 s.d 2022 mencakup dimensi militer, kemanusiaan, pembangunan, dan diplomasi pertahanan. Seluruh kontribusi ini dilakukan sesuai mandat PBB, namun juga mengandung nilai strategis bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia.

1. Dimensi Keamanan dan Perlindungan Warga Sipil

TNI AD, sebagai bagian dari Kontingen Garuda, berperan menjaga keamanan di sektor tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh MONUSCO. Tugas ini meliputi patroli rutin di wilayah rawan konflik, pengamanan fasilitas publik, dan pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan. Pasukan Indonesia juga aktif dalam operasi gabungan bersama Angkatan Bersenjata Kongo (FARDC) untuk mengatasi kelompok bersenjata yang mengancam warga sipil (Puspren TNI, 2021). Kehadiran TNI AD memberi efek pencegahan (*deterrence*) bagi potensi serangan milisi terhadap penduduk lokal.

Selain itu, TNI AD menerapkan pendekatan humanis dalam patroli dan pengamanan, dengan membangun komunikasi baik dengan tokoh masyarakat setempat. Hal ini membantu mengurangi ketegangan, mencegah kesalahpahaman, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pasukan PBB.

2. Dimensi Kemanusiaan

TNI AD terlibat dalam pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas medis (Brawijaya, 2025). Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan, serta penanganan darurat. Kegiatan kemanusiaan juga mencakup distribusi makanan, air bersih, dan pakaian bagi pengungsi yang terdampak konflik. Selain bantuan langsung, TNI AD juga berkontribusi dalam kampanye penyadaran masyarakat, seperti penyuluhan tentang kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini membantu membangun hubungan kepercayaan antara pasukan perdamaian dan komunitas lokal.

3. Dimensi Pembangunan Infrastruktur

Salah satu kontribusi signifikan TNI AD adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar. Kontingen Indonesia, yang dilengkapi unit Zeni, membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan merenovasi fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan. Proyek infrastruktur ini mendukung mobilitas warga, mempermudah akses ke layanan dasar, dan meningkatkan konektivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk diplomasi pertahanan yang memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap kesejahteraan warga sipil di daerah konflik.

4. Dimensi Diplomasi Pertahanan

Kehadiran TNI AD di MONUSCO memperluas jaringan kerja sama pertahanan Indonesia, baik dengan negara-negara anggota PBB lainnya maupun dengan aktor lokal. Interaksi dalam operasi gabungan, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan bersama memperkuat kapasitas kolektif dan membangun kepercayaan lintas negara.

TNI AD juga berperan sebagai duta bangsa, membawa nilai-nilai budaya Indonesia melalui interaksi sehari-hari, kegiatan olahraga, seni, dan kuliner. Hal ini menciptakan citra positif Indonesia di mata masyarakat Kongo dan komunitas internasional.

Konteks Strategis bagi Indonesia

Keterlibatan TNI AD dalam MONUSCO memiliki nilai strategis bagi politik luar negeri Indonesia. Pertama, kontribusi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu dari lima besar negara pengirim pasukan terbanyak ke misi PBB. Kedua, pengalaman lapangan meningkatkan kemampuan TNI AD dalam operasi multinasional, yang bermanfaat untuk kesiapan pertahanan nasional. Ketiga, diplomasi pertahanan yang dijalankan TNI AD mendukung citra Indonesia sebagai negara berkomitmen pada perdamaian global, sejalan dengan prinsip bebas aktif.

Penelitian juga mencatat sejumlah kendala yang dihadapi TNI AD di MONUSCO, antara lain (Faizal Nasution et al., 2024):

- Medan geografis yang sulit, seperti hutan lebat dan infrastruktur jalan yang buruk.
- Ancaman kelompok bersenjata yang tidak terprediksi, dengan taktik gerilya dan mobilitas tinggi.
- Kompleksitas sosial-budaya, termasuk perbedaan bahasa dan norma lokal.
- Koordinasi antar komponen militer, polisi, dan sipil PBB yang kadang terhambat oleh perbedaan prosedur dan prioritas.

Selain itu, meskipun TNI AD berhasil melaksanakan tugasnya, terdapat kebutuhan untuk memperkuat aspek diplomasi simbolik, dokumentasi misi, dan pelaporan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk tujuan diplomatik jangka panjang.

Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan TNI AD di MONUSCO antara lain:

- Patroli gabungan di wilayah Beni untuk mencegah serangan *Allied Democratic Forces* (ADF).
- Pembangunan jembatan darurat yang menghubungkan desa terisolasi dengan pasar utama.
- Penyelenggaraan “*Indonesian Cultural Day*” di markas misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada pasukan multinasional dan warga lokal (IndonesiaDefense, 2025).
- Operasi medis massal yang melayani banyak pasien dalam satu hari.

Kegiatan TNI AD memberi dampak positif nyata bagi masyarakat setempat, antara lain meningkatnya rasa aman, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur, serta hubungan sosial yang lebih harmonis antara pasukan PBB dan komunitas lokal. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap pasukan Indonesia relatif tinggi, yang memperkuat efektivitas misi di lapangan (Surya, 2022).

Peran TNI AD ini juga dapat dilihat dari beberapa kerangka Teori HI, dari perspektif realisme, negara dipandang sebagai aktor utama yang berusaha menjaga kepentingan nasional di tengah sistem internasional yang anarkis. Keterlibatan TNI AD di MONUSCO, meskipun dilaksanakan dalam kerangka misi perdamaian PBB, tetap memiliki nilai strategis yang berkaitan erat dengan keamanan nasional. Kehadiran pasukan Indonesia di Kongo memberikan pengalaman operasi di medan yang kompleks, yang pada gilirannya meningkatkan kesiapan dan profesionalisme militer. Selain itu, partisipasi aktif ini memperkuat posisi tawar Indonesia di forum internasional, termasuk dalam diskusi keamanan di PBB. Interaksi dengan militer negara lain membuka peluang bagi kerja sama pertahanan di masa depan, baik berupa latihan bersama, pertukaran informasi, maupun koordinasi keamanan regional. Dengan demikian, dari kacamata realis, kontribusi TNI AD di MONUSCO adalah investasi strategis yang memperkuat *hard power* Indonesia sekaligus meningkatkan pengaruhnya di tataran global.

Sementara itu, teori diplomasi pertahanan menjelaskan bagaimana militer dapat berperan sebagai instrumen non-tempur untuk membangun hubungan dan mencegah konflik. Dalam misi MONUSCO, TNI AD menunjukkan peran ini melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pembangunan. Pembangunan jembatan, perbaikan sekolah, pelayanan medis gratis, hingga program penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal. Lebih dari itu, TNI AD aktif mempromosikan budaya Indonesia melalui kegiatan seperti Indonesian Cultural Day, pertandingan olahraga persahabatan, dan pembagian kuliner khas nusantara. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal dengan masyarakat setempat, tetapi juga mempererat kerja sama dengan pasukan multinasional. Operasi gabungan dengan Angkatan Bersenjata Kongo (FARDC) dan koordinasi lintas negara di bawah mandat PBB menjadi bukti nyata bahwa diplomasi pertahanan berjalan paralel dengan tugas keamanan, menciptakan citra Indonesia sebagai negara yang mampu menggabungkan kekuatan militer dengan sentuhan humanis.

Perspektif konstruktivisme menawarkan pandangan berbeda dengan menekankan peran norma, identitas, dan ide dalam membentuk perilaku negara. Partisipasi Indonesia di MONUSCO mencerminkan identitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, solidaritas internasional, dan komitmen terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keterlibatan TNI AD di misi ini memperkuat citra Indonesia sebagai kontributor perdamaian yang netral dan dipercaya oleh komunitas internasional. Nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional yang dijalankan selama misi tidak hanya berdampak pada masyarakat Kongo, tetapi juga membentuk budaya organisasi di tubuh TNI AD sendiri. Interaksi yang terjalin dengan masyarakat lokal dan pasukan negara lain melahirkan proses pembelajaran sosial yang menginternalisasi praktik-praktik terbaik ke dalam kebijakan dan operasi militer di masa depan.

Ketiga perspektif ini saling melengkapi dalam menjelaskan keterlibatan TNI AD di MONUSCO. Realisme menegaskan dimensi strategis dan keuntungan pertahanan, diplomasi pertahanan menunjukkan fungsi militer sebagai alat membangun hubungan dan memperkuat

kerja sama, sementara konstruktivisme menyoroti pembentukan identitas dan internalisasi norma. Gabungan ketiga kerangka teori ini membantu memahami bahwa misi perdamaian bukan sekadar tugas operasional, tetapi juga instrumen strategis untuk memajukan posisi Indonesia di dunia.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara tujuan ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Sinergi antara TNI AD, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan masih dapat ditingkatkan, terutama dalam memanfaatkan hasil misi sebagai bahan diplomasi dan kebijakan jangka panjang. Dokumentasi kegiatan dan dampak misi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Beberapa program kemanusiaan yang dijalankan juga belum memiliki mekanisme keberlanjutan setelah pergantian rotasi pasukan, sehingga dampaknya berpotensi berkurang seiring waktu.

Dari sisi relevansi terhadap politik luar negeri, keterlibatan TNI AD di MONUSCO sejalan dengan prinsip bebas aktif yang mengutamakan perdamaian, kerja sama internasional, dan non-intervensi. Partisipasi ini menjadi bukti konkret komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara yang aktif dalam menjaga stabilitas global. Sebagai salah satu penyumbang pasukan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mendapat pengakuan dan penghargaan yang dapat digunakan sebagai modal diplomasi dalam negosiasi internasional, terutama di isu keamanan dan perdamaian.

Dengan demikian, ini menegaskan bahwa misi TNI AD di MONUSCO tidak hanya berhasil memenuhi mandat PBB, tetapi juga memberikan manfaat strategis, diplomatik, dan identitas yang bernilai bagi Indonesia. Tantangan yang ada menunjukkan perlunya strategi nasional yang lebih terintegrasi agar misi perdamaian ke depan dapat memberikan dampak yang lebih besar, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Misi ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menggabungkan pendekatan keamanan, kemanusiaan, pembangunan, dan diplomasi pertahanan dalam satu paket keterlibatan militer yang terintegrasi. Di lapangan, kontribusi TNI AD secara nyata meningkatkan rasa aman masyarakat di wilayah tanggung jawab mereka. Patroli rutin, pengawalan distribusi bantuan, dan operasi gabungan bersama FARDC terbukti efektif mencegah serangan kelompok bersenjata. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat lokal menjadikan pasukan Indonesia lebih mudah diterima, sehingga tugas keamanan dapat dijalankan dengan risiko gesekan yang lebih rendah. Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan bahwa misi perdamaian bukan hanya tentang kekuatan senjata, melainkan juga keterampilan membangun kepercayaan.

Di luar tugas militer, TNI AD aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan yang memberi dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Kongo. Pembangunan jembatan darurat, renovasi sekolah, perbaikan jalan, dan pelayanan kesehatan gratis menjadi bukti konkret bahwa pasukan perdamaian dapat menjadi agen pembangunan. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan yang melihat Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan.

Dari perspektif diplomasi pertahanan, kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai aset lunak yang memperkuat citra Indonesia di mata internasional. Setiap interaksi, baik melalui kegiatan budaya, olahraga, maupun kerja sama operasional, menjadi sarana untuk

mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan solidaritas. Dengan demikian, TNI AD di MONUSCO bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga duta bangsa yang membawa identitas Indonesia ke panggung dunia. Analisis yang menggabungkan realisme, diplomasi pertahanan, dan konstruktivisme dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian memiliki dimensi yang saling terkait. Dari kacamata realis, misi ini adalah sarana untuk memperkuat kapasitas militer dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum global. Dari perspektif diplomasi pertahanan, keterlibatan ini memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat hubungan antarnegara. Sementara konstruktivisme menjelaskan bagaimana misi ini memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kontributor perdamaian dan pembawa norma-norma internasional.

Namun, penelitian juga menyoroti bahwa keberhasilan ini belum sepenuhnya dioptimalkan di tingkat strategis nasional. Sinergi antar-lembaga di Indonesia masih perlu diperkuat agar hasil misi dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan diplomasi dan kebijakan luar negeri. Pengalaman di lapangan, baik dalam hal taktik militer, pembangunan, maupun diplomasi, seharusnya terdokumentasi dengan baik dan diintegrasikan ke dalam pelatihan serta perencanaan strategis pertahanan. Dengan begitu, setiap rotasi pasukan tidak hanya meninggalkan jejak di negara tuan rumah, tetapi juga membawa pulang pengetahuan dan praktik terbaik yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri.

Selain itu, aspek keberlanjutan program kemanusiaan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Banyak inisiatif positif yang dijalankan TNI AD berpotensi kehilangan dampak jangka panjang jika tidak diikuti oleh mekanisme tindak lanjut, baik oleh rotasi pasukan berikutnya maupun oleh mitra lokal dan internasional. Keberhasilan jangka pendek yang dicapai di MONUSCO akan lebih bermakna jika dapat dihubungkan dengan pembangunan kapasitas lokal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, keterlibatan TNI AD di MONUSCO adalah cerminan nyata politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang mengedepankan perdamaian, kerja sama internasional, dan solidaritas global. Misi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton dalam isu keamanan internasional, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang siap mengambil tanggung jawab dalam menjaga stabilitas dunia. Dengan menggabungkan kekuatan militer, pendekatan kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa kontribusi terhadap perdamaian dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi negara di kancah global.

Keterlibatan TNI AD di MONUSCO pada periode 2021-2022 menunjukkan bahwa misi perdamaian dapat menjadi wadah untuk menggabungkan kemampuan militer dengan nilai kemanusiaan. Patroli keamanan, operasi gabungan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan medis dijalankan berdampingan dengan upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat pasukan Indonesia diterima dengan baik dan memberi dampak positif yang nyata bagi warga di wilayah tugasnya.

Pengalaman di lapangan juga memberi keuntungan strategis bagi Indonesia. Kemampuan personel meningkat melalui keterlibatan dalam operasi multinasional, hubungan kerja sama dengan militer negara lain semakin luas, dan citra Indonesia di mata internasional semakin kuat sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian. Meskipun ada tantangan seperti koordinasi antar-lembaga dan kesinambungan program, capaian yang diraih membuktikan bahwa kontribusi ini berjalan efektif dan relevan dengan kepentingan nasional.

Ke depan, keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi pijakan untuk memperluas peran pada misi-misi serupa, memastikan bahwa setiap kontribusi tidak hanya memenuhi mandat keamanan, tetapi juga meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang dilindungi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

KESIMPULAN

Keterlibatan TNI AD dalam Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) pada periode 2021–2022 memperlihatkan bagaimana kekuatan militer dapat dioptimalkan sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Peran yang dijalankan tidak hanya terbatas pada fungsi keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan kemanusiaan, dan penguatan hubungan dengan masyarakat setempat. Pendekatan ini menegaskan kemampuan Indonesia untuk menggabungkan dimensi strategis, operasional, dan humanis dalam satu paket kontribusi yang utuh.

Dari perspektif teoritis, realisme menjelaskan manfaat strategis dan peningkatan posisi tawar Indonesia di kancah internasional; diplomasi pertahanan menunjukkan fungsi militer dalam membangun kepercayaan dan kerja sama; sementara konstruktivisme menyoroti pembentukan identitas Indonesia sebagai negara kontributor perdamaian. Ketiga perspektif ini menggambarkan bahwa misi perdamaian tidak hanya memenuhi mandat internasional, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat posisi Indonesia di tataran global.

Meski telah menunjukkan keberhasilan, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek sinergi antar-lembaga, dokumentasi hasil misi, dan keberlanjutan program pasca-rotasi pasukan. Dengan mengoptimalkan pembelajaran dari pengalaman MONUSCO, Indonesia berpeluang memperluas peran dalam misi-misi mendatang, sekaligus memantapkan citra sebagai aktor yang mampu memadukan kekuatan militer dan nilai kemanusiaan untuk perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, S., & Yuliati. (2020). KONFLIK TERBENTUKNYA NEGARA ISRAEL PADA TAHUN 1948-1973. *Journal of Social Science and Education*, 1(2), 61–70.
- Brawijaya. (2025, June 27). Langkah Kecil, Dampak Besar: TNI dan MONUSCO Perkuat Akses Kesehatan di Kongo. *Brawijaya Insider*. <https://brawijayainsider.com/langkah-kecil-dampak-besar-tni-dan-monusco-perkuat-akses-kesehatan-di-kongo/>
- Faizal Nasution, M., Adriyanto, A., & Simajuntak, H. D. A. (2024). Pendekatan Strategis dan Operasional Kontingen Garuda XXXIX-D MONUSCO dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 7(2).
- IndonesiaDefense. (2025, April 25). Kebudayaan Indonesia Warnai Medal Parade Satgas BGC 39-F/MONUSCO di Kongo. *Indonesia Defense*.

<https://indonesiadefense.com/kebudayaan-indonesia-warnai-medal-parade-satgas-bgc-39-f-monusco-di-kongo/>

MONUSCO. (n.d.). Background of MONUSCO. *United Nations Peacekeeping*. Retrieved August 12, 2025, from <https://monusco.unmissions.org/en/background>

Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.

PUSPEN TNI. (2015, December 11). Kapuspen TNI : Sejak 1957 Sebanyak 32.191 Prajurit TNI Aktif Dalam Misi PBB. *PUSPEN TNI*. <https://tni.mil.id/view-88539-kapuspen-tni-sejak-1957-sebanyak-32191-prajurit-tni-aktif-dalam-misi-pbb.html>

Puspen TNI. (2021, September 13). Emban Tugas Sulit Di Kongo, Force Commander Apresiasi Satgas Kizi TNI. *TNI*. <https://tni.mil.id/view-202495-emban-tugas-sulit-di-kongo-force-commander-apresiasi-satgas-kizi-tni.html>

Surya, A. (2022, January 3). Kedekatan Satgas Indo RDB 39C Monusco Dengan Masyarakat Kongo . *Kompas.Tv*. <https://www.kompas.tv/feature/247990/kedekatan-satgas-indo-rdb-39c-monusco-dengan-masyarakat-kongo-4-cerita-militer>

Yusfiana, R. (2014). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM). *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 4(2).